BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan untuk meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, yaitu dengan kualitas yang diberikan kepada masyarakat, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pembangunan, dan kersejahteraan masyarakat.

Pergantian kepemimpinan di Indonesia sebagian besar banyak memberikan perubahan di berbagai bidang. Salah satu perubahan yang terjadi adalah bentuk pemerintahan yang sentralistik, yaitu pemerintahan yang bertujuan menjadikan bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera secara pemerintahan pusat, kemudian diganti pemerintahan desentralistik. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah, yang menetapkan bahwa pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas

desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai perwujudan otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan dalam pengambilan keputusan secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah kabupaten dan kota, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah itu sendiri. Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimililki oleh masing-masing daerah.

Keberhasilan penyelenggaran otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri didalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang mempunyai proporsi lebih kecil dari pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan

pemerintah daerah dan sudah sewajarnya PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Transparansi yang sangat diperlukan oleh publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas atas pengelolaan daerah harus didukung sistem ekonomi pemerintah yang mampu menyediakan informasi untuk tujuan pertanggungjawaban, mengontrol, dan kebijakan keuangan disamping konsep *value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi

masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus direalisasikan sesuai dengan keperluan yang bersifat umum dan mengarah pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, sehingga pemerintah dinilai telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Salah satu komponen pertanggungjawaban APBD menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah laporan realisasi anggaran belanja. Laporan ini dimaksudkan untuk memberi keterangan tentang belanja yang terealisasi berdasarkan APBD tahun berjalan. Setiap entitas pemerintahan diwajibkan untuk menyusun anggaran realisasi belanja.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

(a) Pendapatan

(b) Belanja

(c) Transfer

(d) Surplus atau defisit

(e) Penerimaan pembiayaan

(f) Pengeluaran pembiayaan

(g) Pembiayaan neto; dan

(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Masing-masing pos tersebut diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode anggaran sehingga dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan untuk bahan evaluasi di tahun yang akan datang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlibat langsung dalam penyusunan laporan realisasi anggaran secara berkala di sektor pemerintahan, sehingga proses penilaian kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Proses penyusunan laporan realisasi anggaran ini mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan agar hasil dari laporan keuangan tersebut dinilai wajar.

Dengan dilaksanakannya penyusunan laporan realisasi anggaran, maka kinerja keuangan pemerintahan dapat diukur dan dinilai oleh pihak yang berkepentingan dan nantinya akan dilakukan evaluasi mengarah pada asas otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan penyusunan laporan realisasi anggaran telah melakukan hal tersebut dengan aturan yang berlaku.

Penilaian kinerja keuangan sektor pemerintahan mengacu pada laporan keuangan yang dibuat, salah satunya adalah laporan realisasi anggaran yang didalamnya terdapat perbandingan antara anggaran tahun berkenaan dengan realisasinya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 terdapat pos pendapatan yang tidak memberikan kontribusi yang optimal, yaitu Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan yang menunjukan realisasi tidak melebihi anggaran, sehingga hal tersebut dinilai kurang efektif dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dan dalam pos belanja transfer dengan presentase yang jauh dari anggaran, hal tersebut menunjukan telah dilakukannya efisiensi belanja ataukah tidak berjalannya program yang direncanakan, sehingga kinerja pemerintahan dapat dinilai dengan presentase yang ada. (*wawancara dengan karyawan di Biro Akuntansi dan Pelaporan*)

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009"**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam penulisan laporan ini, pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis berkaitan mengenai analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meliputi:

1. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdapat pos pendapatan yang tidak memberikan kontribusi yang optimal terhadap realisasinya.
2. Kinerja pemerintah belum sepenuhnya melakukan efisiensi terhadap pos belanja secara menyeluruh, hal ini dapat dilihat dalam pos belanja transfer dan belanja modal dengan realisasi yang jauh dari anggarannya, sehingga menunjukan kurang baiknya perencanaan yang dibuat pemerintah.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai analisis kinerja keuangan dengan pendekatan laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini pada Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat biro Akuntansi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan dengan pendekatan laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pihak Lain

   Sebagai bahan acuan dan bahan referensi khususnya untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, mengenai analisis kinerja keuangan dengan pendekatan laporan realisasi anggaran.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Bagi Instansi Perusahaan

   Diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran yang berguna dalam peningkatan kualitas kinerja keuangan dengan pendekatan laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bagian Akuntansi dan Pelaporan yang beralamat di Jl. Diponegoro No.22 Bandung 40115,Telp (022) 4232448 – 4233347 – 423096.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli.

Tabel 1.1
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Bulan					
		Feb 2011	Maret 2011	April 2011	Mei 2011	Juni 2011	Juli 2011
I	Persiapan Penelitian						
	1. Permohonan Ijin Penelitian	■					
	2. Realisasi Ijin Penelitian		■				
	3. Penentuan Tempat Penelitian		■				
	2. Surat penerimaaan dari instansi			■			
	5. Ujian Komprehensif		■				
II	Pelaksanaan Penelitian						
	1. Aktivitas Penelitian		■	■	■	■	■
	2. Bimbingan Penelitian		■	■	■	■	■
	pembimbing instansi						
III	Pelaporan Penelitian						
	1. Konsultasi Dengan dosen		■	■	■	■	■
	Penelitian						
	2. Bimbingan dengan dosen		■	■	■	■	■
	Penelitian						
	3. Pembuatan Laporan Penelitian		■	■	■	■	
	4. Ujian Penelitian						■
	5. Final pembuatan laporan						■
	Penelitian						
	6.Pengumpulan Laporan Penelitian						■